

**IMPLIKASI PENGESAHAN PERPPU CIPTA KERJA MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP PARTISIPASI DAN PENGAWASAN PUBLIK
(Studi Kasus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang)**

SKRIPSI

Oleh

Alfu An Akbarul Fikri

NIM. 05020422023



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfu An Akbarul Fikri
NIM : 05020422023
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Implikasi Pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Partisipasi dan Pengawasan Publik: Studi Kasus Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 09 Februari 2026

Yang



The image shows a handwritten signature in black ink over a 10,000 Rupiah stamp and a yellow adhesive stamp. The adhesive stamp is labeled 'METERAI TEMPEL' and has the number '59759ANX261460786' printed on it.

Alfu An Akbarul Fikri

NIM. 05020422023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfu An Akbarul Fikri

NIM : 05020422023

Judul : Implikasi Pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Partisipasi Dan Pengawasan Publik: Studi Kasus UU No. 6 Tahun 2023

' Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 09 Februari 2026
Pembimbing,



Ahmad Fathan Aniq, S.SI, MA.
NIP.198401072009011006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfu An Akbarul Fikri

NIM. : 05020422023

Judul : Implikasi Pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Partisipasi Dan Pengawasan Publik: Studi Kasus Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Ahmad Fathan Aniq, S.SI, MA.

NIP. 19401072009011006

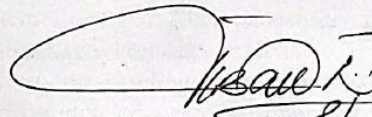
Penguji III



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M. Si

NIP. 197809202009011009

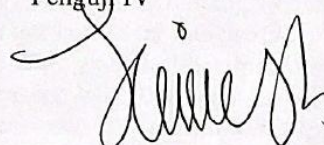
Penguji II



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si

NIP. 197803152003121004

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 2 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



D. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-
8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di
bawah ini, saya:

Nama : Alfu An Akbrul Fikri

NIM : 05020422023

Fakultas/Jurusan: Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Publik Islam/ Prodi Hukum Tata Negara

E-mail address : akbarulfikri87@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas
karya ilmiah:

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....

yang berjudul :

Implikasi Pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap
Partisipasi Dan Pengawasan Publik (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-
Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan,
mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di
Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu
meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang
timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 April 2026
Penulis

(Alfu An Akbarul Fikri)

ABSTRAK

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 menimbulkan kontroversi. Perppu ini diterbitkan sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil serta inkonstitusional bersyarat. Proses pengesahan yang berlangsung cepat dengan keterbatasan ruang partisipasi masyarakat, khususnya kelompok pekerja, akademisi, dan organisasi lingkungan, berpotensi melanggar asas transparansi dan partisipatif dalam pembentukan hukum yang demokratis. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: (1) Bagaimana implikasi pengesahan UU No. 6 Tahun 2023 terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan? (2) Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* dalam pengesahan perppu Cipta Kerja menjadi UU No. 6 Tahun 2023?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer berupa UU No. 6 Tahun 2023, Perppu Cipta Kerja, dan dokumen resmi terkait proses legislasi, sedangkan data sekunder meliputi literatur, jurnal ilmiah, buku teori hukum tata negara, serta penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Dengan kerangka teori partisipasi publik, pengawasan publik, dan *maṣlahah mursalah* sebagai landasan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 menyebabkan penurunan signifikan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan melemahkan mekanisme pengawasan publik. Proses yang cepat dan tertutup melanggar prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keterbatasan partisipasi ini melemahkan kualitas substansi dan legitimasi sosial UU No. 6 Tahun 2023, yang terlihat dari demonstrasi massal, penolakan masyarakat sipil, dan pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Dari perspektif *fiqh Siyāsah* dan teori *maṣlahah mursalah*, pengesahan ini bermasalah karena tidak memenuhi kriteria *dharūrah* (keadaan darurat) yang sejati, melanggar prinsip musyawarah (*asy-shūrā*), mengabaikan prinsip keadilan (*al-'Adālah*), dan tidak mencapai kemaslahatan umum yang universal (*maṣlahah kulliyah*) karena mengorbankan perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan hidup.

Penelitian merekomendasikan agar pemerintah dan DPR membatasi penggunaan Perppu hanya untuk situasi kegentingan memaksa yang benar-benar memenuhi kriteria konstitusional, meningkatkan mekanisme partisipasi publik yang inklusif dan transparan dalam proses legislasi terutama untuk regulasi berdampak luas, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2023 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dampak negatif dan melakukan perbaikan, serta Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan secara mendalam permohonan baik dari aspek formil maupun materiil untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Landasan Teori.....	19
I. Definisi Operasional.....	22
J. Metode Penelitian.....	23
K. Sistematika Pembahasan	28
BAB II INTEGRASI TEORI PARTISIPASI DAN PENGAWASAN PUBLIK DENGAN KONSEP <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	30
A. Teori Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi	30
1. Konsep Partisipasi Publik	30
2. Fungsi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang.....	32
3. Prinsip-Prinsip Partisipasi Publik yang Bermakna	34
B. Teori Pengawasan Publik terhadap Pelaksanaan Undang-Undang.....	36
1. Fungsi Pengawasan Publik dalam Konteks Legislasi	37
2. Hubungan Partisipasi Publik dan Pengawasan Publik.....	38
C. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i> dalam <i>Fiqh Siyāsah</i>	39
1. Konsep <i>Fiqh Siyāsah</i> sebagai Kerangka Etika Politik Islam.....	39
2. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i> dan Relevansinya dalam Pembentukan Hukum	40
3. Konsep ihwal kegentingan menurut <i>Fiqh Siyāsah</i>	41

BAB III IMPLIKASI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES LEGISLASI DAN PENGAWASAN PUBLIK	43
A. Proses Pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU No. 6 Tahun 2023 .	43
1. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022.....	43
2. Proses Pengesahan Perppu Menjadi Undang-Undang.....	46
B. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi	48
1. Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Legislasi	48
2. Dampak Keterbatasan Partisipasi terhadap Kualitas dan Legitimasi Undang-Undang.....	49
C. Implikasi Pengesahan terhadap Mekanisme Pengawasan Publik	53
1. Pengawasan Publik dalam Sistem Demokrasi	53
2. Peran <i>Judicial review</i> sebagai Mekanisme Pengawasan.....	53
BAB IV ANALISIS TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH (MAŞLAĤAH MURSALAH)</i> TERHADAP PENGESAHAN PERPPU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023	56
A. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyāsah</i> dalam Pembentukan Kebijakan Publik	56
1. <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> dalam Legislasi Modern.....	56
2. Hubungan antara Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i>	58
3. Prinsip Kemaslahatan Umum (<i>Al-maşlahah al-‘āmmah</i>).....	60
B. <i>Maşlahah Mursalah</i> sebagai Landasan Analisis.....	61
1. Definisi dan Ruang Lingkup <i>Maşlahah Mursalah</i>	61
2. Hierarki <i>Maşlahah: Darūriyyah, Ḥajjiyyāt, dan Tahsīniyyāt</i>	62
C. Proses Pengesahan Perppu Cipta Kerja dari Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	64
1. Konsep "Ihwal Kegentingan yang Memaksa" dalam Perspektif <i>Dharūrah</i>	64
2. Partisipasi Publik dalam Kerangka <i>Syura</i> dan <i>Maşlahah</i>	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	80
BIOGRAFI PENULIS	87

DAFTAR PUSTAKA

i. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ii. Al-Qur'an

Al-Qur'an, Ali Imran:135, *Al-Qur'an Al-Karim*. Rasm Utsmani. Terjemahan Kementerian Agama RI. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.

Al-Qur'an, As-Syura:38, *Al-Qur'an Al-Karim*. Rasm Utsmani. Terjemahan Kementerian Agama RI. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.

iii. Skripsi

Rahmadona, Tri “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pembentukan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.” *Skripsi*, No. February (2024): 4–6.

Indriyani, Ayu “Civil Society Dan Legislasi Studi Atas Penolakan Muhammadiyah Dalam Pengesahan Ruu *Omnibus law* Cipta Kerja,” *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (2022).

Zamri, Ahmad Rizaldin. "Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyāsah Dusturiyah." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.

Wijanarko, Savina Atria Damayanti "Uu Cipta Kerja : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Formil Uu No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* 2, (2023)

iv. Jurnal

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018).

Ahwadzy, Muhammad Arfan. "Implementation of *Fiqh Siyāsah* in Indonesia's Democratic System." *Siyāsah Wa Qanuniah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 3, no. 1 (2025).

Anam, Putra Adibil dan Inda Rahadiyan. "Pengaturan Jabatan Rangkap Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris BUMN: Perbandingan Indonesia Dengan Amerika Serikat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023).

Danriani, Henny. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023).

Hilyati Anita, Adellia Essa Safitri, Eva Noor Fatimah, dan Akhmad Zaki Yamani. "Menuju Kesejahteraan Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic dan Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1251–1266.

Areliya, Faraz Almira. "Dialektika Emergency of State Dan Tujuan Hukum Dalam Penetapan PERPPU 2/2022 Menjadi Undang-Undang." *Jurist-Diction* 6, no. 4 (2023).

Azhara, Melisa Ayu dan Siti Ruhama Mardhatillah. "Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya

- Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 256–276.
- Bachmid, Fahri. “Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” *Reformasi* 13, no. 2 (2023).
- Bimantya, Deva Mahendra Caesar dan Muh Ali Masnun. “Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).” *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2025).
- Sulistiyawati, Anida Kharamah dan Akhmad Zaki Yamani. “Penerapan Nilai-Nilai Siyasaḥ Syar’iyyah Dalam Kebijakan Publik Nasional.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3 (2025): 959–968.
- Farih, Amin. “REINTERPRETASI MASLAḤAH SEBAGAI METODE ISTINBĀṬ HUKUM ISLAM: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Shāṭibī.” *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015).
- Fauzi, Egi, Herry Tarmidjie Noor, dan Fahmi Ali Ramdhani. “Konsep Partisipasi Publik Yang Bermakna Sebagai Pencegahan Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia.” *Jurnal Reformasi* 14, no. 1 (2024).
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. “Kajian Konstitusionalitas Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2023).
- Guswara, Arrafi Bima, dan Ali Imran Nasution. “Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023.” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023).
- Habermas, Jürgen dan M Ied Al Munir. “Dari Kritis Ke Tindakan Komunikatif (Kritik Jürgen Habermas Terhadap Modernitas Dan Rasionalitas) M. Ied Al Munir” 19, no. 1 (2023).

- Haq, Muhammad Fakhrul, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, Muhammad Junaidi, Albertus Heru Nuswanto, dan Rati Riana. "Eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025).
- Hariadi, David, Hesti Wulan, dan Sonya Claudia Siwu. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023).
- Haykal, Haykal. "Problematika Pembentukan Perppu Cipta Kerja: Pergeseran Jangka Waktu Persetujuan Perppu Oleh Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 5 (2025).
- Helmi, Muhammad Ishar. "Penyelesaian Satu Atap Perkara *Judicial review* Di Mahkamah Konstitusi." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 1 (2019).
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018).
- Hipan, Marno dan Muhammad Abdi Sabri I Budahu. "Problematika PERPPU Cipta Kerja Dalam Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Media Hukum* 11, no. 1 (2023).
- Indriyani, Ayu. "Civil Society Dan Legislasi (Studi Atas Penolakan Muhammadiyah Dalam Pengesahan Ruu *Omnibus law* Cipta Kerja)." *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (2022).
- Islam, Mohammad Rasikhul Islam. "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (*Darūriyyah, Hajjiyyāt Dan Tahsiniyat*)." *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024).
- Izzati, Nabiyla Risfa. "Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024).

Julrdana, Rizky, Pran Mario Simanjuntak, dan Sultan Fadillah Effendi. “Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022).

Kamizi, Fajar, Sarkowi, Marzuki, dan Dodi Irawan. “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasa Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia” (n.d.): 17–24.

Yitawati, Meirza Aulia Chairani dan Angga Pramodya Pradhana. “Problematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dalam Memberikan Perlindungan Dan Kesejahteraan Pekerja.” *Jurnal Rechts* 13, No. 1 (2024): 97–117.

Maritza, Dhiya Fahriyyah dan Taufiqurokhman Taufiqurokhman. “Peranan Masyarakat Sipil Dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik Yang Aktif.” *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI* 14, no. 1 (2024): 71–84.

Marsanti, Aliyah dan Wilma Silalahi. “Analisis Yuridis Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Judicial Review.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence dan Digital Business* 4, no. 3 (2025).

Muslim, Muhammad Huzaifi. “Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023).

Muthalib, Abdul Salman. “Siyāsah dustūriyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an.” *Tafse: Journal of Qur’anic Studies* 4, no. 2 (2019).

Nababan, Ramsul, Ayu Tri Chahyani, Hanaya Manuela Ambarita, Tebi Tefianta Banjarnahor, Ulan Dari, dan Yulia Fanissah Sihotang. “Studi Tentang Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Proses Pembentukan Peraturan-Undang-Undang Di Indonesia.” *Jurnal Inovasi Pendidikan* 7, no. 12 (2024).

Parlindungan, Ronald. “Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Di Masa Reformasi.” *Jurnal Trias Politika* 3, no. 1 (2019).

Rahmadina, Adji Annisa, Alisha Fasya Khoirunissa, Harmono Harmono, dan Alip Rahman. "Peran Serta Masyarakat Dalam Legislasi Nasional: Analisis Normatif UU SISDIKNAS Dan UU KIP Dalam Prespektif Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 3, no. 3 (2025).

Rasji, Rasji, Puja Ayu Purwanti, Puja Ayu Purwanti, Sherlyana Indah Saputri, dan Sherlyana Indah Saputri. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang Di Indonesia Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Formil UU Cipta Kerja." *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning dan Law* 2, no. 1 (2025).

Rasji, Rasji, Christopher Howard Wonohadidjojo, dan Michelle Audrey Serena. "Kewenangan *Judicial review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication dan Technology* 1, no. 2 (2024).

Rasji, Rasji, Pascal Amadeo Yapputro, dan Maulida Syahrin Najmi. "Korelasi Pendekatan Progresif Satjipto Raharjo Dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023).

Ritonga, Rifdany. "*Judicial review* Berbasis Representation-Reinforcing: Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Dalam Demokrasi Modern." *PUSKAPSI Law Review* 5, no. 1 (2025).

Rohim, Ade Nur. "*Dharūrah* dan the Realization of Maqashid Sharia: Analysis of the Implementation of Islamic Legal Maxims on Emergency." *Nurani* 22, no. 1 (2022).

Rohman, Taufiqur. "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang *Maslahah* Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (2017).

Runnada, An Nisa Khudd. "Legitimasi Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Konflik." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 9, no. 1 (2025).

Khairunnisa, Salsabila Shafa dan Primerta Putri Hapsari. “Penolakan Buruh Terhadap Pengesahan *Omnibus law* Cipta Kerja Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat”, *JDIH DPRD Prov Jateng* (2025).

Sulistiono, Sandy dan Widyawati Boediningsih. “Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 2 (2023).

Dondokambey, Sarah Malena Danrea “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Lex Privatum* Volume XI, no. 2 (2023).

Sari, Rhiska Novita, Jerriyansah, Angga Setia Wibowo, Octari Listiana, M. Thoriq Elfajar, Mochamad Wahyu Kurniawan, Putri Ratna Sari, M. Rizqy Danriawan, dan Abidin Latua. “Ketatanegaraan Menurut Imam Al-Mawardi.” *Psikosopen : Jurnal Psikososial dan Pendidikan* 1, no. 1 (2025).

Nikmah, Siti Wasiatun “Menakar Hukum Darurat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Yang Telah Disetujui Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Siti.” *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 2 (2023): 428–447.

Rambe, Dinda Suciana dan Ely Dasnawati. “Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum.” *WICARANA* 2, no. 2 (2023).

Sukardi, A. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 18, no. 1 (2025).

Sumakul, Tommy Ferdy, dan Nelly Pinangkaan. “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang” (2023).

Sumodiningrat, Aprilian. “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja.” *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023).

Susanto, Jonathan David., Josepus Y. Pinori, dan Grace Karwur. “Implikasi

Pembentukan Undang- Undang Dengan Metode *Omnibus Law* Dari Perspektif Hukum Tata Negara.” *Lex Privatum* 15, no. 1 (2025).

Tanjung, Indra Utama, dan Dhiauddin Tanjung. “Etika Politik Dalam *Fiqh Siyāsah*: Studi Tentang Prinsip Akhlak Dalam Politik Menurut Perspektif Fiqh.” *Journal of Law dan Nation (JOLN)* 2, no. 3 (2023).

Z, Rijal Mummazziq. “Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi Dan Pengaruhnya Dalam *Fiqh Siyāsah* (Ulasan Atas Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Wilayah Al-Diniyyah).” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2023).

v. **Website**

Fitri Novia Heriani, Ini Alasan Partai Demokrat Dan Pks Tolak Perppu Cipta Kerja Jadi UU,16 Februari 2023, Akses 16 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-partai-demokrat-dan-pks-tolak-perppu-cipta-kerja-jadi-uu-lt63ee1a210037e/>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A